

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi masyarakat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang penting bagi kehidupan suatu bangsa. Pangan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, berbagai gejolak sosial dan politik serta stabilitas ekonomi nasional akan terganggu (Kementrian Sekretariat Negara RI 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Merata dan terjangkau tergolong dalam aspek akses pangan. Dimana, merata yaitu bahwasanya pangan terjamin untuk distribusi secara merata ke setiap daerah sehingga pangan mudah diperoleh masyarakat dan terjangkau yaitu bahwasanya pangan memungkinkan untuk diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga wajar (Malik, H 2014).

Ketahanan pangan dipahami sebagai suatu sistem yang menyangkut ketersediaan pangan, akses pangan dan konsumsi pangan yang direfleksikan dalam pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan atas produk pangan. Ketersediaan pangan dinyatakan dengan segala usaha untuk

produksi pangan, akses diimplementasikan dengan penciptaan sistem alir pemasaran, dan konsumsi ditempuh dengan kebijakan-kebijakan tentang kaidah menyangkut nilai gizi dan keamanan pangan (Sunarminto 2010).

Tabel 1. Produksi Pangan Nasional

Jenis Pangan	Produksi (juta ton)		persentase
	2014	2105	
Padi	70,85	75,36	4,51 persen
Jagung	19,01	19,61	6,37 persen
Kedelai	0,955	0,963	3,17 persen

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016

Aspek akses pangan dapat dilihat dengan distribusi pendapatan, daya beli masyarakat, harga pangan dan pengeluaran pangan. Distribusi pendapatan Indonesia dapat dilihat dengan *Gini Ratio*, nilainya kisaran angka nol sampai satu. Semakin mendekati nol maka distribusi pendapatan yang diterima hampir merata atau ketimpangan rendah sebaliknya jika mendekati satu maka distribusi pendapatan tidak merata atau ketimpangan tinggi yang berakibat pada daya beli masyarakat rendah. Pada September 2015, daerah pedesaan memiliki indeks *Gini Ratio* sebesar 0,33 relatif tidak berubah dibanding bulan Maret 2015 (BPS 2016).

Harga pangan di Indonesia masih bersifat fluktuatif. Persoalan harga pangan menjadi hal yang sensitif, karena jika harga tinggi maka masyarakat tidak dapat mengakses pangan sebaliknya jika harga pangan rendah maka petani bisa dirugikan. Badan Pusat Statistik mencatat pengeluaran utama masyarakat Indonesia masih untuk pangan. Berdasarkan hasil Susenas BPS pada September 2015, Penduduk pedesaan mengeluarkan sebesar 57,28 persen untuk konsumsi bahan pangan, sisanya sebesar 42,72 persen digunakan untuk konsumsi bukan makanan (BPS 2015). Ketahanan pangan memiliki hubungan negatif dengan

pengeluaran pangan. Jadi, semakin besar pengeluaran pangan suatu rumah tangga maka semakin rendah ketahanan pangan rumah tangga tersebut, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, pemanfaatan pangan berkaitan dengan bagaimana pangan yang dikonsumsi mengandung gizi yang baik dan manfaat bagi kesehatan individu. Pemanfaatan pangan diukur melalui kemampuan pemenuhan kebutuhan energi dan gizi yang dapat dilihat dari Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Ketahanan pangan di Indonesia secara nasional tergolong cukup apabila dilihat dari sisi ketersediaan, namun tidak dengan sisi akses. Kondisi akses dilihat dari tingginya ketimpangan pendapatan, rendahnya daya beli masyarakat, fluktuatifnya harga pangan dan tingginya pengeluaran pangan. Itu artinya, meskipun ketersediaan pangan melimpah, namun pangan tersebut tidak bisa diakses oleh semua warga. Jadi akses merupakan salah satu elemen penting dalam ketahanan pangan, karena akses merupakan penghubung antara ketersediaan pangan dan penyerapan pangan. Jika ketersediaan tidak didukung oleh akses maka masyarakat tidak dapat memanfaatkan pangan dengan optimal, oleh karena itu tidak akan tercapai ketahanan pangan (Malik H 2014).

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten lumbung padi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dilihat dari aspek ketersediaan, Bantul dapat mencapai kondisi ketahanan pangan yang baik dengan surplus beras 34.015 ton, dengan angka kecukupan energi 3.064 kkal/kapita/hari dan kecukupan protein 76,31 gram/kapita/hari (Kaharisma 2015). Walaupun demikian, Bantul menjadi satu dari tiga kabupaten di Yogyakarta yang masih rawan pangan. Penyebab desa rawan pangan adalah kemiskinan (Nursalikhah, A. 2017). Menurut Bappeda jumlah

warga miskin di Bantul mencapai 98.604 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 34,12% dari jumlah total penduduk Kabupaten Bantul 2015 sebesar 919.440. Dilihat dari aspek pemanfaatannya (*utilitas*), masih terdapat balita gizi buruk sejumlah 195 Balita, dengan jumlah Laki-laki 108 Balita dan Perempuan 87 Balita (Pandji, M.S 2016).

Melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melihat ketahanan pangan berdasarkan aspek akses pangan di Kabupaten Bantul. Setelah melakukan identifikasi ketahanan pangan berdasarkan akses pangan, penelitian ini akan melihat sebaran pemetaan daerah tahan pangan dan rawan pangan dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana karakteristik wilayah dan prioritas ketahanan pangan berdasarkan indikator aspek akses pangan?

### **B. Tujuan**

1. Menganalisis karakteristik wilayah berdasarkan indikator aspek akses pangan.
2. Mengetahui prioritas ketahanan pangan pada tingkat desa berdasarkan akses pangan di Kabupaten Bantul.

### **C. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah pusat maupun provinsi mengenai ketahanan pangan Kabupaten Bantul dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merencanakan strategi dan pengambilan keputusan menghadapi rawan pangan.